

## ABSTRAK

### **Novia Fauziah, 1218010153, 2025: “Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Pada Kementerian Agama Kota Bandung”**

Latar belakang penelitian ini berfokus pada program bimbingan perkawinan calon pengantin yang diselenggarakan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bandung. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup mengenai kehidupan pernikahan kepada calon pengantin. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2023, implementasi program bimbingan perkawinan belum berjalan maksimal, dengan capaian 80% dari target 1.500 pasangan. Namun, berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2024 terjadi peningkatan dengan tercapainya target 1.800 pasangan. Meski menunjukkan kemajuan, akan tetapi masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana implementasi program ini berjalan di lapangan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program bimbingan perkawinan calon pengantin pada Kementerian Agama Kota Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan dalam program bimbingan perkawinan, mengevaluasi sumber daya yang mendukung pelaksanaan program, mengidentifikasi disposisi para pelaksana, serta mengkaji peran struktur birokrasi dalam implementasi program tersebut.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan berbagai informan dari Bimas Islam, Kantor Urusan Agama, dan calon pengantin yang mengikuti program. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan antara pembuat dan pelaksana kebijakan berjalan cukup baik. Informasi kebijakan disampaikan dengan jelas dan konsisten. Sumber daya yang dimiliki Bimas Islam Kementerian Agama Kota Bandung cukup memadai, namun terbatas dalam hal SDM jumlah fasilitator dan fasilitas pendukung. Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan sikap positif, antusias, dan kemauan yang kuat dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan. Struktur birokrasi mendukung implementasi, beberapa hambatan dalam proses administratif dapat mempengaruhi kelancaran program, namun secara keseluruhan struktur birokrasi berfungsi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, bimbingan perkawinan